

KRISIS MORAL DAN KRISIS IDENTITAS: KENDALA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI¹

Oleh: Rusydi Syahra²

Globalisasi telah menjadi suatu kenyataan yang harus dihadapi oleh seluruh bangsa (dan budaya) di dunia. Globalisasi merupakan tantangan yang tidak ada satu bangsa pun dapat menghindarinya. Sebagaimana semua perubahan mendasar dalam sejarah (seperti gejala modernisasi yang berlangsung sebelumnya dan yang masih berlanjut hingga saat ini), globalisasi bukanlah masalah pilihan. Kita tidak bisa memilih mana di antara situasi historis yang akan kita hadapi, tetapi kita dapat mengambil peluang terbaik yang dihadirkan sejarah kepada kita (Madison, 1998).

Pendahuluan

Kutipan di atas menyiratkan bahwa apapun yang kita lakukan sekarang dan waktu selanjutnya sangat menentukan seberapa jauh kita berhasil mendapat manfaat dari proses globalisasi yang berlangsung dalam hampir segala bidang kehidupan. Kita, terlebih generasi muda, tidak mungkin dapat menghindar dari proses perubahan kehidupan yang berlangsung pesat itu dan kembali hidup seperti manusia gua dalam sebuah *trogloodyte*, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang futuris lebih duapuluh tahun yang lalu (Toffler, 1984). Hampir tidak dapat dibayangkan bagaimana orang-orang yang merupakan produk perkembangan budaya sekarang ini bisa diajak untuk kembali ke alam kehidupan dalam komunitas tradisional yang penuh kedamaian seperti yang dinikmati generasi masa lalu. Kompleksitas kehidupan yang menyertai perubahan di segala bidang telah menyebabkan setiap orang mau tidak mau harus menatap ke depan dan menyesuaikan diri dengan perubahan itu kalau tidak ingin mengalami keterasingan atau alienasi³. Fenomena globalisasi itu sendiri merupakan suatu fenomena kompleks yang telah menimbulkan persoalan menyangkut identitas nasional banyak bangsa di dunia. Oleh karenanya tidak ada yang bisa memastikan seberapa jauh suatu kelompok masyarakat atau bangsa mendapat manfaat dari proses globalisasi itu atau justru terbawa hanyut di bawah arus gelombang pengaruhnya sehingga kehilangan berbagai ciri identitasnya sebagai bangsa⁴.

¹ Makalah disampaikan pada Simposium dan Lokakarya Internasional II: Globalisasi dan Kebudayaan Lokal: Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru, diselenggarakan oleh Jurusan Antropologi, FISIP Universitas Indonesia, bekerjasama dengan Jurusan Antropologi FISIP, Universitas Andalas, di Padang, 18-21 Juli 2001.

² Peneliti, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

³ Rheingold (1992), misalnya, menggambarkan berkat kemajuan teknologi komputer dan internet semakin banyak muncul ikatan-ikatan sosial melalui *virtual community* atau komunitas bayangan, melalui mana semua orang dari pelosaok manapun di dunia bisa saling bertukar informasi melalui *cyberspace* tanpa ada hambatan ruang dan waktu. Oleh karena itu, kritik Putnam (1995) tentang menurunnya jumlah masyarakat Amerika yang terlibat dalam jaringan sosial konvensional sebagai indikasi menurunnya *social capital* atau modal sosial dianggap kurang mengenai sasaran, karena tidak memperhitungkan perkembangan pesat komunitas bayangan yang menjadi pelengkap bagi jaringan hubungan sosial dalam komunitas konvensional (London, 1997).

⁴ Seperti ditulis Cohen (2000) gejala globalisasi seperti penyeragaman mata uang menjadi Euro untuk semua negara anggota ME telah menimbulkan kontroversi luas di Denmark. Sebagian warga masyarakat menganggap penyeragaman mata uang itu akan berakibat hilangnya rasa bangga terhadap mata uang *krona*

Yang jelas adalah banyak sekali negara bangsa dan masyarakat di dunia, baik negara-negara industri maju sendiri maupun negara berkembang yang merasa identitas nasionalnya terusik oleh proses globalisasi.⁵

Pembahasan tentang globalisasi dan kaitannya dengan krisis moral dan krisis identitas dapat dilakukan melalui dua sisi. Pada sisi pertama proses globalisasi ditempatkan sebagai variabel independen, sebagai suatu faktor yang menimbulkan permasalahan pada identitas pribadi, identitas sosial maupun identitas nasional, serta yang mempengaruhi moralitas bangsa. Pada sisi lain pembahasan akan menjawab sebuah pertanyaan sejauh mana bangsa Indonesia yang sedang menghadapi krisis moral dan krisis identitas sekarang ini mampu membendung dampak globalisasi yang berpengaruh negatif terhadap kehidupan politik, ekonomi dan sosial. Makalah ini tidaklah dimaksudkan untuk memberikan jawaban tuntas terhadap kedua hal tersebut. Tetapi lebih merupakan bahan diskusi untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang proses globalisasi yang perlu diidentifikasi segala kemungkinan dampak positif dan negatif yang dapat ditimbulkannya.

Menelaah kaitan antara proses globalisasi dengan krisis moral dan krisis identitas sebagai bagian dari krisis multidimensional yang kita hadapi sekarang ini maka tak dapat diperlukan pemahaman yang memadai tentang konsep globalisasi, moralitas dan identitas itu sendiri. Oleh karena itu makalah ini terlebih dahulu akan memaparkan pandangan beberapa pakar tentang ketiga konsep tersebut dan kemudian mengaplikasikan ke dalam konteks situasi yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia dewasa ini. Makalah ini ditutup dengan menawarkan saran tentang langkah-langkah strategis yang mungkin dapat ditempuh guna membangun kembali moralitas dan identitas bangsa agar lebih mampu secara positif menghadapi arus gelombang globalisasi.

Globalisasi sebagai Fenomena Multidimensi

Globalisasi merupakan suatu fenomena bersifat multidimensional, meliputi keseluruhan aspek kehidupan politik, ideologi, ekonomi, sosial dan kultural. Oleh karena itu globalisasi tidak dapat diukur dengan cara pengukuran ekonomi yang sempit, seperti neraca perdagangan, FDI (investasi asing langsung) atau pengaruh pada produk domestik bruto (Higgot dan Reich, 1998). Dengan kata lain “fenomena globalisasi itu sendiri memang bersifat global, dalam arti meliputi keseluruhan aspek kehidupan. Walaupun yang paling jelas kelihatan adalah sebagai gejala dalam kehidupan material dan ekonomi, tetapi sama halnya dengan setiap perubahan besar dalam peradaban, fenomena globalisasi juga memiliki makna kultural dan spiritual mendasar” (Madison 1998).

Mengingat demikian luas aspek yang tercakup dan saling pengaruh di antaranya maka Higgot dan Reich (1998) menyarankan fenomena globalisasi untuk didefinisikan berdasarkan empat dimensi pendekatan, yakni:

Pertama, globalisasi sebagai periode sejarah. Dalam konteks ini globalisasi diartikan sebagai suatu periode khusus dalam sejarah, dan tidak dilihat sebagai gejala

yang telah merupakan salah satu ciri identitas nasional yang penting, sedangkan sebagian lainnya menganggap hal tersebut sebagai kenyataan dalam perkembangan global yang tidak perlu dipersoalkan.

⁵ Sulitnya mempertahankan identitas nasional yang tradisional sebagai akibat dampak globalisasi tidak hanya dipermasalahkan di negara-negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin, tetapi juga di negara-negara maju seperti Jepang (Nobuo, 2001), Denmark (Cohen, 2000), Jerman (Muller, 2001), dan negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Eropa lainnya, seperti Inggris, Italia dan Belgia (Eastman, 1992).

sosiologis atau sebuah kerangka teori. Globalisasi dipandang sebagai suatu periode sejarah yang dimulai sejak berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin dan berlangsung hingga waktu ini.

Kedua, globalisasi sebagai saling pengaruh gejala ekonomi. Berbeda dengan perspektif di atas, globalisasi tidak dilihat sebagai periode sejarah, melainkan dilihat secara fungsional sebagai suatu rentetan gejala perubahan dalam sistem perekonomian dunia. Dalam perubahan ini termasuk liberalisasi dan deregulasi pasar, swastanisasi aset perusahaan negara, berkurangnya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi, difusi teknologi, distribusi produksi manufaktur antar negara melalui investasi asing langsung, dan integrasi pasar modal. Globalisasi dalam arti ekonomi ini merupakan suatu gejala yang paling menonjol dan dipahami masyarakat.

Ketiga, globalisasi sebagai bentuk hegemoni nilai-nilai budaya Amerika. Dalam ini globalisasi diartikan secara normatif sebagai sesuatu yang baik, yang menunjukkan kemenangan paham modernisasi dan demokrasi. Globalisasi dalam hal ini ditandai oleh industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya campur tangan negara dalam urusan ekonomi, pemerintah yang dipilih langsung dan diawasi oleh dewan perwakilan rakyat, serta konsep liberal tentang kebebasan memilih. Dalam hal ini pengertian globalisasi memiliki kesamaan dengan modernisasi dalam pemikiran politik Amerika, yang memandang akan terjadinya universalisasi nilai-nilai budaya berdasarkan prinsip kapitalisme dan demokrasi.

Keempat, globalisasi sebagai revolusi teknologi industri. Globalisasi dalam pandangan ini adalah suatu bentuk kegiatan yang sama sekali baru, yang timbul sebagai akibat perubahan drastis dari kapitalisme industri menuju konsepsi hubungan ekonomi pasca-industri. Perubahan ini didorong oleh revolusi dalam elit teknologi yang akhirnya terkonsolidasi dalam satu pasar global. Ini merupakan suatu proses produksi global yang terpadu secara komprehensif yang menyangkut pasar tenaga kerja interdependen, swastanisasi aset pemerintah, dan jaringan hubungan teknologi melintasi batas-batas negara konvensional.

Dari keempat pengertian tentang globalisasi yang dikemukakan Higgot dan Reich (1998) di atas terlihat bahwa kecuali yang pertama, globalisasi sebagai periode sejarah, ketiga yang lainnya mencakup proses-proses dinamis di dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dikatakan sebagian besar berasal dari Amerika Serikat. Sejak berakhirnya Perang Dingin dan bubarinya Uni Sovyet negara ini praktis menjadi satu-satunya negara adikuasa. Proses-proses itu kemudian menyebar ke seantero dunia, melibatkan hampir semua negara. Masing-masing negara mendapat pengaruh yang beragam, baik dalam bentuk pengaruh positif maupun dalam bentuk dampak negatif, sesuai dengan kemampuan keseluruhan sumberdaya yang dimiliki.

Krisis moral dan krisis identitas yang dialami banyak negara, secara langsung tidak mempunyai kaitan dengan proses globalisasi itu. Seperti perkembangan pesat teknologi komputer dan internet yang telah membuka kemungkinan bagi siapa saja untuk mendapatkan ragam informasi yang tak terhingga. Pertukaran informasi yang dilakukan melalui jaringan komunitas virtual yang melibatkan banyak orang dari mancanegara berpotensi menimbulkan keterasingan seseorang dari lingkungannya komunitas fisiknya sendiri, sehingga akan semakin sulit baginya mengidentifikasi diri dengan komunitas

itu. Sementara itu, warga masyarakat lainnya sekalipun tidak menggunakan akses langsung terhadap jaringan komunikasi global itu, secara tidak disadari sebenarnya juga terkena imbas pengaruh globalisasi melalui kecenderungan mengkonsumsi berbagai produk budaya yang berasal dari negara-negara maju.

Akan tetapi dapat dikatakan bahwa penyebab utama terjadinya krisis moral dan krisis identitas sosial pada bangsa Indonesia justru adalah kebijakan pemerintah selama lebih dari tiga dasawarsa yang terlalu menekankan industrialisasi dan modernisasi di bidang ekonomi, sementara pembangunan budaya dan karakter bangsa ditelantarkan. Dapat diasumsikan bahwa krisis moral yang masih berlanjut hingga saat ini justru berpangkal pada tidak terbangunnya suatu moralitas bangsa yang kuat. Padahal moralitas semacam itulah yang dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk menangkali terjadinya berbagai praktek immoral dalam kehidupan politik dan ekonomi, seperti yang merajalela samapai sekarang. Bagaimana moralitas itu dibentuk dan mengapa krisis moral terjadi dipaparkan pada bagian berikut ini.

Moralitas dan Krisis Moral

Pengertian tentang krisis moral akan lebih mudah dipahami apabila terlebih dahulu diberikan pemaparan singkat tentang moralitas atau sistem moral. Moralitas adalah suatu sistem terdiri dari seperangkat nilai, keyakinan dan norma yang dimiliki suatu masyarakat secara kolektif yang membatasi pikiran dan tindakan setiap individu yang mejadi warganya. Moralitas atau sistem moral itu harus memiliki otoritas – artinya setiap orang merasa harus mengindahkannya, dan mereka mau diikat oleh aturan-aturan itu. Selain itu, aturan-aturan moral merupakan produk dari deliberasi yang berlangsung dalam kelompok, yang begitu menjadi kesepakatan akan mengikat orang-orang ke dalam kelompok bersangkutan dan membuat mereka sebagai bagian dari jaringan hubungan atau *network of relations* yang berada di atas eksistensi individunya masing-masing. Moralitas memberi semangat disiplin kepada setiap anggota guna melakukan penegndalian dan pengikatan diri kepada kelompok.

Jacques Ellul (1969) menggolongkan moralitas ke dalam tiga kategori, yakni: moralitas hidup (*lived Morality*), kebiasaan moral (*moral custom*), dan moralitas teoritis (*theoretical morality*). Moralitas hidup adalah seperangkat sikap-sikap moral yang efektif dalam suatu masyarakat pada masa tertentu. Sikap-sikap moral ini tidak sepenuhnya konsisten sepanjang waktu, dan sebagian besar juga tidak diciptakan secara sadar. Moralitas hidup lebih merupakan pencerminan keadaan saat ini tentang apa yang dianggap penting dan baik untuk keberlangsungan hidup masyarakat dan tentang citra yang ideal dari masyarakat mengenai dirinya sendiri. Kebiasaan moral adalah moralitas hidup pada masa lalu yang masih diteruskan hingga waktu ini. Moralitas semacam ini hanya bisa tetap bertahan sejauh tidak bertentangan dengan moralitas hidup yang berlaku pada saat ini. Sementara itu, moralitas teoritis adalah seperangkat etika normatif dari para filosof atau rohaniwan yang seringkali diwujudkan dalam bentuk sistem filsafat.

Untuk dapat mengatakan suatu sikap atau tindakan sesuai dengan moral atau tidak, perlu pemahaman akan adanya tatanan yang wajar tentang segala sesuatu (*natural order of things*), dan pemahaman bahwa semua fenomena yang ada di jagad raya ini diikat oleh tata aturan yang diperlukan ,yang disebut hukum (Durkheim, 1965). Masalah moral yang terpenting menurut Durkheim adalah keperluan akan adanya keseimbangan

yang dapat diterima antara kebutuhan dan kehendak individu dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat keseluruhan dan bagaimana keseimbangan ini bisa dicapai (dalam Marske, 1996). Bila kebutuhan dan kehendak masyarakat keseluruhan yang merupakan kesadaran kolektif terlalu kuasa, penyimpangan yang betapapun kecilnya diharamkan, kebebasan, inisiatif dan kreativitas individu menjadi terpasung. Akibatnya, bahkan perubahan sosial yang sebenarnya diperlukan juga tak dapat berlangsung. Dalam suasana semacam itu, masyarakat yang diwakili keyakinan, nilai dan norma bersama atau kolektif, mendominasi kesadaran individu dengan otoritas yang begitu mutlak, sehingga perubahan moral tidak mungkin terjadi (Durkheim, dalam Lukes, 1972: 191-225).

Durkheim (dalam Turner et al, 1985) mengukur tingkat moralitas yang ada pada setiap kelompok masyarakat dengan menggunakan empat variabel: (1) volume, (2) intensitas, (3) kejelasan atau *determinatenessi* dan (4) muatan. Volume menunjukkan sejauh mana nilai-nilai, norma-norma dan keyakinan-keyakinan yang merupakan bagian dari moralitas dimiliki secara bersama oleh setiap anggota suatu masyarakat. Intensitas menunjukkan sejauh mana moralitas atau kesadaran kolektif itu memiliki kekuatan untuk mengarahkan pikiran, sikap dan tindakan seseorang. *Determinateness* menunjukkan tingkat kejelasan setiap komponen yang merupakan bagian moralitas. Muatan berkaitan dengan perbandingan jumlah antara simbol-simbol yang bersumber pada religi atau agama dan pemikiran sekuler yang menjai bagian dari moralitas.

Bila sistem moral tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya, artinya bila keseimbangan antara kebutuhan dan kehendak individu dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat keseluruhan bisa tetap terjaga, maka suatu kelompok masyarakat tidak akan mengalami permasalahan moral. Krisis moral baru mulai timbul apabila (1) berbagai unsur moralitas mulai mengalami erosi, (2) sebagian penting anggota masyarakat tidak lagi merasa terikat dengan aturan-aturan moral yang telah menjadi kesepakatan bersama, (3) moralitas mengalami pelemahan sehingga tidak lagi memiliki otoritas atau kekuasaan untuk tidak mengendalikan sikap dan perilaku anggota masyarakat, (4) tidak terjadi lagi kemarahan moral atau *moral outrage* dari sebagian besar anggota masyarakat terhadap seseorang yang melanggar aturan moral (Durkheim, dalam Lukes, 1972). Secara lebih rinci keempat masalah yang bisa dianggap merupakan indikasi terjadinya krisis moral ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

(1) Unsur-unsur moralitas mengalami erosi. Berbagai faktor seperti perubahan sosial yang berlangsung cepat akibat arus pengaruh budaya luar dan globalisasi, misalnya dapat menyebabkan nilai-nilai dan norma-norma yang sebelumnya merupakan bagian dari moralitas hidup suatu kelompok masyarakat mengalami reduksi menjadi sekedar kebiasaan yang boleh diikuti dan juga boleh tidak, karena dianggap sudah tidak begitu sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan, seperti misalnya, Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa secara disengaja atau tidak telah memberi kontribusi besar terhadap keruntuhan sendi-sendi kehidupan kelembagaan masyarakat tradisional di berbagai daerah, yang sebelumnya sangat fungsional dalam memelihara moralitas yang penting bagi keberlangsungan kerukunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Tidak berfungsinya berbagai kelembagaan masyarakat tradisional yang ada telah menyebabkan masyarakat kehilangan wahana yang penting bagi masyarakat guna melakukan interaksi dalam upaya menjaga dan memperbarui unsur-unsur moralitas hidupnya. Dalam kasus masyarakat Minangkabau, misalnya, masyarakat kehilangan

forum dan kesempatan untuk duduk bersama-sama memberi makna pepatah “*sakali ale gadang sekali tapiian baranjak*” (setiap kali sungai banjir, setiap kali pula tepian berpindah, dan *lapuak-lapuak dikajangi, usang-usang dibarui* (yang lapuk diganti dan yang usang diperbarui). Masyarakat kehilangan kesempatan untuk dapat terus menerus melakukan evaluasi terhadap unsur-unsur moralitas yang dimiliki dan menggantinya dengan yang sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Krisis moral pun terjadi karena norma-norma dan nilai-nilai lama sudah tidak berlaku lagi sementara norma-norma dan nilai-nilai baru belum ada yang disepakati untuk menjadi bagian moralitas hidup.

(2) Masyarakat tidak terikat lagi pada aturan moral. Melemahnya kohesi sosial terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami transisi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern menyebabkan sebagian penting anggota masyarakat tidak lagi merasa terikat dengan aturan-aturan moral yang telah menjadi kesepakatan bersama. Aturan-aturan moral yang sebelumnya merupakan bagian dari moralitas telah banyak ditinggalkan, sementara aturan yang baru sebagai pengganti tidak ada. Dengan demikian banyak orang yang bersikap dan berperilaku tanpa dilandasi moralitas yang jelas. Ini terjadi karena moralitas telah kehilangan sifat *determinateness* yang penting untuk menunjukkan tingkat kejelasan setiap unsur yang merupakan bagian-bagian moralitas hidup. Akibat tidak jelasnya lagi aturan-aturan moral ini adalah keadaan *anomie* dan individualisme yang berlebihan semakin menggejala dalam masyarakat, terutama di wilayah perkotaan.

(3) Moralitas mengalami pelemahan intensitas. Intensitas menunjukkan sejauh mana moralitas atau kesadaran kolektif itu memiliki kekuatan untuk mengarahkan pikiran, sikap dan tindakan seseorang. Moralitas sebagai hasil kesepakatan bersama menjadi kuat bila sebagian penting masyarakat masih mendukung dan menghidupkannya. Moralitas menghendaki orang untuk mematuhi dari dalam, karena, “sementara moralitas berada di atas kita ia juga ada dalam diri kita, dan ia hanya bisa menjadi ada oleh dan melalui kita” (Durkheim dalam Turner et al, 1983:347). Oleh karena itu, bila telah ditinggalkan dan tidak dipatuhi sebagian penting pendukungnya, dengan sendirinya moralitas tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengendalikan sikap dan tindakan anggota masyarakat. Terlebih bila tidak ada lagi tokoh pimpinan yang dipandang dan dihormati sebagai pemegang otoritas moral.

(4) Tidak terjadi kemarahan moral. Kemarahan moral atau *moral outrage* yang berupa reaksi keras dari sebagian besar anggota masyarakat terhadap seseorang yang melanggar aturan moral merupakan mekanisme yang penting dan diperlukan untuk menjaga keberlangsungan moralitas hidup. Membiarkan pelanggaran moral terjadi tanpa ada reaksi dan protes dapat menimbulkan anggapan pada si pelanggar bahwa siakp atau tingkah laku yang diperlihatkannya tidak bertentangan dengan aturan moral. Apabila pelanggaran demi pelanggaran terus berlangsung, tanpa banyak orang yang peduli untuk membela tegaknya aturan moral maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan yang tadinya merupakan bagian dari moralitas hidup akan tereduksi menjadi sekedar *moral custom* atau kebiasaan moral yang tidak menuntut kepatuhan seseorang. Artinya terserah pada kemauan setiap individu untuk mengikuti atau tidak, tidak ada mekanisme yang dapat memaksanya dan tidak ada saksi sosial apabila ia tidak menyesuaikan sikap dan tindakan dengan aturan-aturan moral yang ada.

Agar kemarahan moral dapat terjadi volume, intensitas, kejelasan dan muatan aturan moral harus berada pada tingkat kecukupan yang memadai. Kecil kemungkinan

kemarahan moral bisa terjadi apabila: (1) nilai-nilai, norma-norma dan keyakinan-keyakinan yang merupakan bagian dari moralitas dimiliki secara bersama oleh setiap anggota masyarakat telah mengalami erosi, atau moralitas hidup telah tereduksi menjadi kebiasaan moral; (2) sebagian penting anggota masyarakat tidak lagi merasa terikat dengan aturan-aturan moral; dan apabila (3) moralitas yang ada sudah tidak lagi menjadi kesadaran kolektif yang kuat sehingga tidak lagi memiliki otoritas dan daya untuk mengarahkan serta mengendalikan pikiran, sikap dan tindakan seseorang. Karena itu yang terpenting dalam hal bagaimana semangat disiplin sebagai pencerminan utama dari moralitas suatu masyarakat dapat terwujud atau dipertahankan.

Krisis moral berkaitan erat dengan krisis identitas. Krisis identitas terjadi ketika warga suatu komunitas tidak mampu lagi untuk secara bersama-sama melakukan deliberasi guna mengidentifikasi hal-hal yang mengikat mereka ke dalam suatu kelompok sosial. Moralitas hidup atau sistem moral yang berlaku dalam suatu komunitas dapat menjadi bagian yang sangat penting dari keseluruhan identitas suatu bangsa, kelompok etnis atau kelompok sosial lainnya. Surutnya fungsi dan peranan adat sebagai sistem moral yang menjadi pedoman hidup masyarakat Minangkabau di daerah asalnya, misalnya, bisa dirasakan sebagai kehilangan suatu ciri utama identitas “ke-Minangkabauan”. Pemaparan di bawah ini dimaksudkan sebagai elaborasi dari pernyataan di atas.

Krisis identitas

Dalam pengertian paling sederhana adalah pemikiran mengenai apa dan siapa kita. Identitas dapat menyangkut seseorang sebagai individu maupun sejumlah orang sebagai suatu kelompok sosial. Identitas sosial pada dasarnya adalah kerangka kategorisasi yang sengaja dibuat untuk menegaskan perbedaan dan kontras antar kelompok. Para anggota yang memandang penting menunjukkan perbedaan dan kontras antar kelompok. Para anggota yang memandang penting menunjukkan perbedaan dan kontras antar kelompok ini secara proaktif menanamkan perasaan “*in-group*”, dengan menempatkan diri terpisah dengan anggota kelompok lain. Dengan cara seperti ini mereka menjalin hubungan yang erat di antara sesama mereka sendiri dan menumbuhkan pentingnya rasa memiliki terhadap kelompok, serta perlunya mempertahankan kepentingan kelompok.

Akan tetapi penting untuk dipahami bahwa identitas sosial dan identitas nasional memiliki satu ciri penting, yakni keberadaannya yang selalu dalam keadaan berfluktuasi. Sejauh mana seseorang atau sekelompok orang mengidentifikasi diri dengan suatu bangsa, misalnya, ditentukan oleh kekuatan kohesif dari suatu bangsa. Apalagi, seperti dikatakan Anderson (1991) sebenarnya bangsa adalah “komunitas politik bayangan – dan dibayangkan sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan membatasi dan berdaulat. Komunitas bangsa hanya ada dalam bayangan, karena para warga dari sebuah bangsa yang paling kecilpun tidak kenal dengan sebagian besar sesama warga bangsanya, tidak pernah bertemu dengan mereka dan bahkan mendengar tentang mereka. Namun di dalam pikiran masing-masing hidup suatu bayangan tentang komunitas mereka”. Dengan demikian dapat dipahami, begitu suatu negara kehilangan kedaulatan dan kekuatan perekat bagi seluruh warganya sebagai sebuah bangsa, maka sebagian warga mulai

mempertanyakan apakah mereka masih layak mengidentifikasikan diri sebagai warga negara tersebut. Usaha memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia oleh Gerakan Aceh Merdeka dan Papua Merdeka, misalnya, dapat dilihat dari perspektif ini.

Sementara itu, sebagian orang cenderung mengidentifikasikan dirinya dengan banyak kelompok sosial, berdasarkan faktor-faktor seperti ras, etnisitas, kelas, jender, asal negara dan seterusnya. Faktor-faktor ini menjadi menonjol pada waktu dan cara yang berbeda. Sentimen, emosi dan perilaku dari para anggota kelompok yang menonjol itu cenderung dipengaruhi oleh norma-norma dan aspirasi dari kelompok bersangkutan.

Dalam hal ini seringkali identitas tidak dibentuk melalui pengalaman dan usaha bersama serta melalui proses pembelajaran, tetapi identitas itu bagi sebagian orang adalah apa yang dibeli dan dikonsumsi. Terutama dalam masyarakat perkotaan budaya konsumtif yang sudah ada sebelumnya sekarang semakin mengental, dan mengatasi segalanya. Jadi identitas itu mutlak diperlukan, baik untuk menunjukkan eksistensi suatu kelompok maupun eksistensi individu. Kegagalan untuk memiliki atau hilangnya sejumlah ciri identitas yang dianggap memadai akan menjurus kepada terjadinya krisis identitas.

Perlu pula dipahami bahwa tidak semua aspek identitas itu selalu baik. Rasa keterkaitan yang berlebihan kepada negeri sendiri, keyakinan politik, atau kelompok etnis dan rasial tertentu bisa saja menyebabkan munculnya sikap negatif terhadap orang-orang yang berasal dari kelompok lain. Hal semacam ini akhirnya menjurus pada sikap nasionalisme berlebihan, rasisme, tidak senang pada orang asing (*xenophobia*) dan seterusnya. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya dalam proses identifikasi para anggota suatu kelompok lebih cenderung mencari perbedaan ketimbang persamaan dengan kelompok lain.

Krisis Moral dan Identitas: Implikasinya dalam Masyarakat Indonesia

Seperti telah diurai di atas dalam masyarakat bangsa yang mengalami transisi dan perubahan besar yang menjadikannya semakin terdiferensiasi ke dalam berbagai banyak substruktur berdasarkan okupasi, profesi, kepentingan politik, ekonomi, gender, dan lain-lain, semakin sulit bagi banyak orang untuk mengidentifikasikan dirinya hanya pada salah satu kelompok saja. Mereka bisa menjadi anggota dari beberapa kelompok yang berbeda dengan moralitas yang juga berbeda, tergantung pada ruang dan waktu. Implikasi dari kenyataan sosial semacam ini antara lain akan sulit bagi mereka untuk membangun suatu kesadaran bersama yang bersifat mengikat, karena kepentingan individu atau kelompok kecil lebih mengemuka daripada kepentingan kelompok yang lebih besar. Satu-satunya bentuk pengikat yang mungkin adalah kontrak yang bersifat legal dan formal dalam hubungan yang bersifat sangat rasional.

Menipisnya kesadaran bersama untuk mematuhi aturan-aturan yang baik untuk mencapai tujuan kelompok ini atau dengan istilah lain: semangat disiplin moralitas kelompok, berarti semakin suburnya sifat individualitas dalam masyarakat. Dalam keadaan seperti ini maka tidak mungkin lagi terjadi kemarahan moral terhadap “pelanggaran” terhadap aturan moral yang dilakukan seseorang. Hilangnya sama sekali kemarahan moral sebagai alat pengontrol yang efektif dari masyarakat berakibat individualisme menjadi hampir tidak terbatas dan keadaan anomie akan semakin

merajalela, karena setiap orang sibuk memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan (kelompok) sendiri. Individualisme berlebihan serta tererosinya semangat untuk mencapai tujuan bersama sebagai bangsa inilah yang kemudian menyebabkan banyak orang kehilangan kemampuan untuk mengapresiasi adanya berbagai krisis besar yang sedang dialami bangsa hingga sekarang ini. Dengan istilah populer orang-orang semacam inilah yang sering dikatakan tidak memiliki *sense of crisis*.

Krisis moral cenderung dialami lebih banyak oleh masyarakat perkotaan. Karena dalam masyarakat inilah terutama terjadi proses perubahan yang cepat serta pengaruh proses globalisasi yang deras. Dalam kehidupan masyarakat kota yang sangat heterogen, di mana ikatan-ikatan primordial dan kekerabatan tidak bisa lagi dijadikan andalan untuk mencapai tujuan, banyak orang terpaksa menjadi semakin individualistis dan sibuk memperjuangkan nasib sendiri. Pada banyak migran desa-kota moralitas tradisional dengan ciri kesadaran kuat untuk mencapai tujuan kebaikan bersama yang sebelumnya dimiliki ketika masih tinggal di kampung halaman, yang kemudian ternyata tidak sesuai dengan tuntutan hidup di kota terpaksa ditinggalkan. Sementara bagi para urbanis yang memang lahir dan mengalami sosialisasi di wilayah perkotaan tingkat krisis moral yang dialami ditentukan oleh tingkat kepedulian sosial yang dimiliki.

Tetapi tidak berarti bahwa masyarakat tradisional di pedesaan tidak mengalami krisis. Justru krisis moral dan identitas yang cukup parah dengan berbagai implikasinya telah terjadi dalam masyarakat tradisional dan pinggiran, baik yang berada di Pulau Jawa, dan terutama di beberapa daerah luar Jawa⁶. Penyebab yang dapat dikatakan berlaku umum untuk semua krisis yang terjadi pada masyarakat tradisional itu adalah: selama puluhan tahun terakhir tidak ada perhatian yang memadai dari pihak-pihak berwenang untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan moralitas hidup yang mereka miliki. Yang terjadi justru adalah penyeragaman yang memusnahkan kreativitas masyarakat untuk menentukan apa yang terbaik bagi kehidupan mereka sendiri. Ini secara sadar atau tidak dilakukan melalui serangkaian kebijakan pemerintah, utamanya Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan struktur dan sistem pemerintahan desa seluruh wilayah Indonesia menurut model pemerintahan desa di Jawa.

Selain itu juga tidak kurang akibat buruk terhadap moral masyarakat adalah organisasi militer yang menjangkau sampai ke tingkat desa melalui apa yang disebut bintara pembina desa atau disingkat "babinsa". Kehadiran babinsa ini sekalipun sebenarnya dimaksudkan untuk membantu masyarakat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi, tetapi dalam prakteknya sering menjadi ujung tombak penguasa untuk "menertibkan" anggota masyarakat yang bersikap atau bertindak tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Karenanya kehadiran babinsa cenderung menciptakan rasa takut dalam masyarakat. Bahkan diantara sesama warga masyarakat sendiri timbul rasa saling curiga dan khawatir, jangan-jangan teman sendiri mengadukan ucapannya yang bernada kritik terhadap pemerintah kepada babinsa. Ujung-ujungnya masyarakat hidup penuh

⁶ Pendekatan terbatas dalam melihat masalah identitas dalam masyarakat Indonesia dapat dilihat antara lain melalui tulisan Haba (1999), yang menyoroti dampak kebijakan pemerintah masa lalu yang sentralistik dan tidak memberi peluang bagi masyarakat untuk mengambil inisiatif mengembangkan moralitas dan identitas sendiri. Sementara itu Jakobsen (2000) menyoroti masalah identitas etnis di Sulawesi Selatan, dan Kawilarang (2000) menunjukkan berkembangnya budaya menentang sebagai akibat globalisasi.

ketakutan, saling tidak percaya dan apatis terhadap kehidupan di lingkungan sosial sendiri.

Dalam suasana seperti di atas ini dapat dipahami interaksi sosial dengan frekuensi yang cukup tinggi tidak mungkin dapat berlangsung. Padahal interaksi sosial, terutama yang dilakukan melalui berbagai kelembagaan yang ditumbuhkan masyarakat sendiri, merupakan wahana yang penting untuk memelihara dan mengembangkan moralitas hidup masyarakat bersangkutan. Akibat lanjut dari keadaan ini unsur-unsur moralitas hidup yang dimiliki semakin kehilangan volume, intensitas dan kejelasannya, sehingga sikap dan perilaku anggota masyarakat, terutama dari kalangan generasi muda, semakin tidak mencerminkan moral yang dianggap baik oleh generasi tua.

Berbagai konflik horisontal yang berlangsung dalam masyarakat hingga saat ini juga dapat dijelaskan dengan menggunakan perspektif di atas. Ketika terjadi perubahan mendasar dari rezim pemerintahan otoriter menjadi pemerintahan demokratis, dan ketika militer dan polisi tidak lagi menjadi momok yang ditakuti, masyarakat seolah-olah mendapatkan kebebasan tanpa batas untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Di tengah ketiadaan moralitas hidup yang memadai sebagai pedoman sikap dan perilaku yang menguntungkan untuk mencapai tujuan hidup bersama sesama warga bangsa, dan didorong keinginan untuk menonjolkan identitas kelompok sendiri, maka konflik fisik antar kelompok masyarakat yang berbeda asal suku bangsa, agama, kepentingan politik, bahkan antar desa telah dengan mudah terjadi, dengan jumlah korban jiwa yang besarnya sulit diterima akal sehat. Apalagi apabila suatu konflik telah memiliki akar sejarah yang cukup panjang.

Sebelumnya konflik dan kerusuhan tidak mungkin pecah karena aparat keamanan memiliki wibawa yang cukup besar untuk menindak siapapun yang melanggar ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tetapi begitu kewibawaan itu mulai hilang maka apa yang selama ini dirasakan suatu kelompok masyarakat sebagai deprivasi absolut dan ketidakadilan menemukan “jalan pemecahannya”. Dengan serta merta mereka menunjukkan “kemarahan moral” dan melakukan tindakan balas dendam terhadap kelompok lain yang dianggap telah menimbulkan kerugian besar terhadap kepentingan sosial dan ekonomi mereka selama ini. Konflik-konflik antar kelompok masyarakat, mulai dari Ambon, Maluku, Sambas, serta terakhir di Sampit, Palangkaraya dan Poso, dapat dikatakan merupakan manifestasi dari berbagai kondisi di atas. Demikian juga konflik berskala lebih kecil seperti perkelahian antar desa di Indramayu, Brebes dan lain-lainnya memiliki faktor dominan yang lebih kurang sama. Tidak ada kekuatan internal yang mampu membendung terjadinya konflik tersebut karena para pemimpin formal maupun informal sendiri telah kehilangan fungsi dan peran penting sebagai pemegang otoritas moral dalam komunitas masyarakatnya.

Globalisasi: Rahmat atau Bencana?

Bertumpu pada kenyataan tentang krisis moral dan identitas yang dialami bangsa sekarang ini, maka sebuah pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah apakah bangsa kita mampu mengantisipasi berbagai dampak negatif dari globalisasi atukah kita akan semakin terpuruk dalam krisis multidimensional yang tidak dapat diramalkan kapan akan berakhir? Apakah kita akan bisa mengambil manfaat dari globalisasi dalam pengertian demokratisasi di bidang kehidupan politik dan ekonomi serta revolusi teknologi industri

seperti dikatakan Higgot dan Reich (1999) di atas? Ataukah nilai-nilai sosial budaya yang masih berakar kuat dalam masyarakat kita justru tidak kompatibel dengan prinsip-prinsip demokrasi itu? Sehingga, betapapun besarnya keinginan kita untuk menjadi masyarakat yang demokratis, misalnya, tentu akan sulit terwujud apabila nilai budaya paternalistik atau hubungan *patron-clients* masih melekat kuat dan dipupuk terus sebagai pola hubungan sosial yang *morally legitimate* dan berlaku umum dalam sebagian penting kelompok masyarakat.

Sebagaimana dikatakan Madison (1999), globalisasi telah merupakan sebuah fenomena sejarah yang tidak ada satu bangsapun dapat mengelak dari jangkauannya. Oleh karena itu, sejauh mana suatu bangsa dapat memetik rahmat dan manfaat dari proses globalisasi itu terutama akan sangat banyak tergantung pada kesiapan sumberdaya manusia yang dimilikinya. Krisis ekonomi yang melanda hampir seluruh negara di Asia sejak empat tahun belakangan ini jelas menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki sumberdaya manusia dengan kualitas dan moralitas yang unggul, seperti Korea Selatan, Thailand dan Malaysia tidak mengalami krisis ekonomi yang parah dan mampu untuk segera keluar dari krisis itu. Dengan demikian negara-negara tersebut sudah lebih siap untuk menyongsong sistem perdagangan global, seperti yang akan diwujudkan melalui AFTA dan NAFTA dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Sementara itu, beberapa negara lainnya, terutama Indonesia, dengan kualitas sumberdaya manusia yang terendah di antara negara-negara Asia Tenggara, baik bila diukur dari tingkat pendidikan rata-rata, keterampilan, etos kerja, persentase tenaga profesional yang dimiliki serta moralitas manusianya, mengalami krisis multidimensional berkepanjangan yang tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir⁷.

Globalisasi tampaknya lebih merupakan bencana bagi Indonesia⁸. Krisis ekonomi berkepanjangan yang berpangkal pada merajalelanya krisis moral para pelaku ekonomi telah menyebabkan bangsa Indonesia semakin terjerat dan didikte oleh lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank⁹. Hilangnya sikap kemandirian sebagai bangsa telah menyebabkan seolah-olah tanpa bantuan dari lembaga-lembaga keuangan tersebut Indonesia tidak akan pernah mampu keluar dari krisis. Sikap seperti itu sekaligus menunjukkan besarnya krisis kepercayaan terhadap kemampuan bangsa sendiri untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi.

Penutup

⁷ Parahnya krisis moral di Indonesia dapat diindikasikan dengan peringkat korupsi yang didudukinya. Menurut kajian lembaga *Transparency International* di Jerman pada tahun 1999 Indonesia menduduki peringkat korupsi ketiga terparah di dunia, setelah dua negara di Afrika, Kamerun dan Nigeria.

⁸ Seorang sosiolog senior Austria, Heinz Holley (2000), menyebutkan delapan ciri globalisasi sebagai pembawa bencana: (1) globalisasi sebagai kapitalisme perjudian (*casino capitalism*); (2) globalisasi sebagai anti negara; (3) globalisasi mendorong kompetisi bebas yang saling memusnahkan; (4) globalisasi sebagai penyebab pengangguran tenaga kerja; (5) globalisasi mendorong eksploitasi terhadap negara-negara ekonomi lemah; (6) globalisasi mendorong individualisme tanpa batas; (7) globalisasi menyuburkan imperialisme budaya; dan (8) globalisasi mendorong gerakan neo-nasionalisme dan fundamentalisme.

⁹ Holley (op. cit.) selanjutnya juga melayangkan kecaman keras terhadap globalisasi dan kapitalisme yang oleh para pendukungnya dianggap sebagai "agama modernitas", serta terhadap praktek-praktek lembaga-lembaga keuangan internasional. Ia mengumpamakan Bank Dunia seakan-akan sebuah katedral, IMF sebagai kapel dan para pejabat kedua lembaga itu bertindak sebagai misionaris yang membawa pesan-pesan "kebaikan dan kemurahan hati" para kapitalis kepada masyarakat di seluruh dunia.

Krisis moral dan krisis identitas yang berlangsung hingga saat ini tidak dapat dipisahkan dari praktek-praktek kekuasaan pada masa lalu yang telah mengabaikan pentingnya pembangunan moralitas hidup dan karakter bangsa secara keseluruhan. Pendidikan moral Pancasila memang telah diberikan melalui penataran terhadap hampir seluruh lapisan masyarakat di masa lalu. Tetapi hasilnya lebih banyak menyentuh tingkat kognisi, dan hanya sekedar menjadi pengetahuan tentang moral atau *moralitas teoritis*, sebagaimana dikatakan Jacques Ellul. Tidak sampai menjadi moralitas hidup yang menjadi pedoman dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara. Bahkan penyelenggaraan Penataran P-4 sendiri oleh banyak pihak telah digunakan untuk mendapatkan keuntungan materi melalui cara-cara yang bertentangan dengan moral itu sendiri.

Moralitas hidup yang merupakan roh bagi kelangsungan hidup masyarakat bangsa guna mencapai tujuan bersama perlu mendapatkan perhatian sungguh-sungguh jika bangsa ini hendak dibangun kembali sebagai bangsa yang terhormat di mata dunia. Membiarkan krisis moral dalam masyarakat berlarut-larut tanpa langkah-langkah nyata dan tepat dari pihak-pihak berwenang untuk mengatasinya bisa berarti membiarkan bangsa ini semakin mengalami keterpurukan.

Proses globalisasi merupakan suatu tantangan tetapi sekaligus juga membuka kesempatan luas untuk mendapat manfaat tak terbatas yang dihidirkannya. Tantangan karena keberhasilan suatu bangsa dan negara dalam mengikuti proses globalisasi hanya menjadi mungkin apabila kualitas sumberdaya manusia, institusi sosial, ekonomi, politik dan hukum yang dimiliki benar-benar kompetitif secara global. Karena sebagaimana dikatakan Castell (1998) “perkembangan masyarakat dalam proses globalisasi ini sangat ditentukan oleh kemampuan untuk melakukan interaksi sinergis antara inovasi teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan, yang menghasilkan seperangkat baru organisasi dan institusi yang menciptakan jalur umpanbalik antara produktifitas, fleksibilitas, solidaritas, keamanan, partisipasi dan akuntabilitas, dalam suatu model pembangunan baru yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan”.

Pentingnya interaksi sinergis akan dapat menjadi kesadaran apabila sebagian penting warga bangsa secara intensif melakukan deliberasi melalui berbagai institusi sosial, baik formal maupun informal. Dan hanya dengan membahas secara bersama dan demokratis, dengan melibatkan segenap kelompok masyarakat yang berkepentingan, kontribusi positif dari berbagai kalangan tujuan bersama sebagai bangsa dapat dicapai. Dalam hubungan ini maka sangat penting artinya pengembangan modal sosial (*social capital*) dalam bentuk jaringan hubungan sosial (*networks of social relations*), baik yang bersifat internal pada suatu kelompok masyarakat (*bonding social capital*).

Oleh karena tantangan globalisasi hanya bisa berubah menjadi kesempatan apabila peningkatan kualitas sumberdaya manusia, baik dalam pengertian kemampuan intelektual melalui pendidikan dan pelatihan, maupun peningkatan kualitas moral dan perubahan mental ke arah yang kondusif bagi tercapainya tujuan bersama sebagai bangsa sungguh-sungguh disadari pentingnya oleh semua pihak yang berwenang. Dengan demikian, pembenahan moral dan pemantapan identitas sebagai bangsa yang berdaulat dan mandiri perlu diprioritaskan.

DAFTAR BACAAN

- Anderson, Benedict R. 1991. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. New York: Verso.
- Castells, Manuel. 1998. "Information Technology, Globalization and Social Development" (Makalah pada UNRISD Conference on Information Technology and Social Development, Palais des Nations, Geneva, 22-24 Juni).
- Cohen, Roger. 2000. "A Danish Identity Crisis: Are We Europeans?" *The New York Times*, 10 September.
- Durkheim, Emile [1974] 1991. *Sosiologi dan Filsafat* (terjemahan Soedjono Dirjosisworo dari tulisan dalam bahasa Inggris *Sociology and Philosophy*, Glencoe, III : The Free Press). Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Ellul, Jacques, 1969. *To Will and To Do*. Philadelphia, Pa: Pilgrim Press.
- Haba, John. 1999. "Perubahan Identitas dan Kelompok Etnis", *Suara Pembaruan*, 11 April.
- Higgot, Richard dan Simon Reich. 1998. "Globalisation and Sites of Conflict: Towards Definition and Taxonomy" (Working Paper No. 01, Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation, University of Warwick).
- Holley, Heinz. 2000. *Globalization and Social Anomie: Problems and Chances on the Way to a New World Order* (Swiss Institute of Development: Working Paper 3).
- Jacobsen, Michael. 2000. "Globalization and Ethnic Identity in Indonesia", *IIAS Newsletter*, No.14.
- Kawilarang, Harry. 2000. "Budaya Menentang Mewarnai Reformasi Dunia Abad ke-21", *Khatulistiwa Magazine*, Maret.
- London, Scott. 1997. "Civic Networks: Building Community on the Net" (Makalah dalam Website <scoot.london.com>).
- Madison, G.B. 1998. "Globalization: Challenges and Opportunities" (Working Paper No.1, MacMasters University, Ontario Canada).
- Marske, Charles E. 1996. "Social Capital and Social Morality", dalam Stivers, Richard dan Charles E. Marske (Eds), *Sociology and Social Policy*, Vol 16 No. 1-2, pp 102-119.
- Muller, Henry. 2001. "Germany's Identity Crisis", Bonn: Center for the Study of Democratic Institutions.
- Noda, Nobuo. 2001. "Globalization and Japanese Identity", *Journal of Japanese Trade and Industry*, March-April.
- Putnam, Robert. 1995. "Bowling Alone: America's Declining Social Capital", *Journal of Democracy*, vol. 6 No.1.
- Rheingold, Howard. 1993. *The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier*. New York: Addison-Wesley.
- Stivers, Richards. 1996. "Towards A Sociology of Morality", dalam Richard Stivers dan Charles E. Marske (eds), *Sociology of Morality* (edisi khusus *International Journal of Sociology and Social Policy*, vol 16 No. 1-2, pp 1-14).
- Thompson, Kenneth (ed.). 1985. *Readings from Emile Durkheim*. London: Tavistock Publications.
- Toffler, Alvin. 1984. *Future Shock*. New York: Bantam Books.

Turner, Jonathan H., Leonard Beeghly dan Charles H. Powers. 1989. *The Emergence of Sociological Theory*. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.